

**DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh

FEBI ANESIA ANGGUN KINANTI
NIM/BP : 56570/2010

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

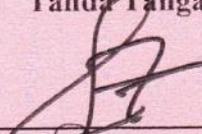
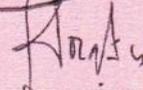
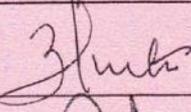
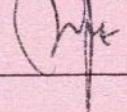
*Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA : Febi Anesia Anggun Kinanti
BP/NIM : 2010/56570
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Progam Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Ali Anis, Ms	1. 
2. Sekretaris	: Melti Roza Adry, SE, ME	2. 
3. Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	3. 
4. Anggota	: Mike Triani, SE, MM	4. 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Febi Anesia Anggun Kinanti
BP/NIM : 2010/56570
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

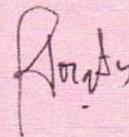
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 195911291986021001

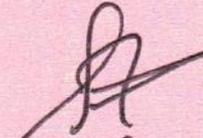
Pembimbing II



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S
NIP.19591129 198602 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Anesia Anggun Kinanti
Nim/ Tahun Masuk : 56570/2010
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 10 Februari 1993
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Simp. Lori Lb. Minturun, Padang
No. HP/telp. : 082386055134
Judul Skripsi : Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga
Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku, serta sanksinya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2016
Yang Menyatakan



FEBLANESIA ANGGUN KINANTI
NIM/BP. 56570/2010

ABSTRAK

Febi Anesia Anggun Kinanti (56570/2010): Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan Di Provinsi Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME.

Kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Angka kemiskinan di Sumatera Barat setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi, mencapai 354.738 jiwa. Rata-rata perubahan tingkat kemiskinan wilayah kota tiap tahunnya lebih kecil dibandingkan pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data Susenas 2014. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 5190 kepala rumah tangga pedesaan. Sampel yang diambil tersebar di pedesaan Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis menggunakan metode Regresi Logistik dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji G dan uji Wald dengan taraf nyata 5%, dengan variabel independennya yaitu usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak berusia dibawah 15 tahun, jumlah anak laki-laki di rumah tangga, jumlah anak perempuan di rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga di Atas 55 Tahun, status perkawinan kepala rumah tangga, jenis lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, status pekerjaan, dan pendidikan. Variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa variabel usia kepala rumah tangga, jumlah anak berusia dibawah 15 tahun, jumlah anak laki-laki di rumah tangga, jumlah anak perempuan di rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga di atas 55 tahun, jenis lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan variabel jenis kelamin kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, dan status pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga, Demografi, Status Sosial Ekonomi, dan Pendidikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul **“DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta Doa demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku pembimbing I dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku pembimbing II yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si serta para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alianis, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Ibu Novya Zulva Riani, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Ibu Mike Triani, SE, MM yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Serta teristimewa juga untuk Tomi Rosalindo orang yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk saya dalam penyelesaian studi saya serta memberikan dorongan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan – rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2010 serta para sahabat – sahabat yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Kemiskinan	11
a. Pengertian Kemiskinan	11
b. Dimensi Kemiskinan	15
c. Jenis Kemiskinan	16
2. Faktor Penyebab Kemiskinan	19
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30

C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
1. Populasi	30
2. Sampel Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Definisi Operasional.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
1. Analisis Regresi Logistik (<i>Logistic Regression Analisis</i>)	34
2. Uji Hipotesis	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	39
a. Letak Geografis Provinsi Sumatera Barat	39
b. Penduduk	40
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	42
a. Deskriptif Kemiskinan Rumah Tangga (Y)	42
b. Deskriptif Demografi (X_1).....	42
c. Deskriptif Status Sosial Ekonomi (X_2).....	47
d. Deskriptif Pendidikan (X_3).....	48
3. Hasil Estimasi.....	49
a. Regresi Logistik.....	49
b. Uji Hipotesis	55
B. Pembahasan.....	57
1. Pengaruh Usia Kepala Rumah Tangga terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat...57	
2. Pengaruh Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	58
3. Pengaruh Jumlah Anak Berusia Dibawah 15 Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	60

4. Pengaruh Jumlah Anak Laki-Laki Di Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	61
5. Pengaruh Jumlah Anak Perempuan Di Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	62
6. Pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga di Atas 55 Tahun Di Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	63
7. Pengaruh Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat...	64
8. Pengaruh Jenis Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	65
9. Pengaruh Status Pekerjaan Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	66
10. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	67
11. Pengaruh Demografi, Status Sosial Ekonomi, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat	68

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2014 Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	7
Tabel 4.1 Penduduk Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat.....	41
Tabel 4.2 Kemiskinan Rumah Tangga yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	42
Tabel 4.3 Usia Kepala Rumah Tangga yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	43
Tabel 4.4 Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.....	43
Tabel 4.5 Jumlah Anak Berusia Dibawah 15 tahun yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	44
Tabel 4.6 Jumlah Anak Laki-Laki Di Rumah Tangga yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	45
Tabel 4.7 Jumlah Anak Perempuan Di Rumah Tangga yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	45
Tabel 4.8 Jumlah Anggota Rumah Tangga Di Atas 55 Tahun yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.....	46
Tabel 4.9 Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga Yang Menjadi Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	47
Tabel 4.10 Jenis Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	47
Tabel 4.11 Status Pekerjaan Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.....	48
Tabel 4.12 Ijazah Terakhir Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga Responden Penelitian Di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	49

Tabel 4.13 Hasil Pendugaan Parameter, <i>Odd Ratio</i> Regresi Logistik, Hasil Uji Wald dan Marginal Effect Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	50
Tabel 4.14 Uji G dan Koefisien Peluang Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Likelihood Ratio (G) Peluang Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Variabel.....	75
2. Hasil Olahan STATA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi juga merupakan kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Sehingga pada dasarnya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2006:28).

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2006:232).

Cahyat, dkk (2007:2) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boa (2008) seiring krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 1998, yakni sebesar 49,5 juta jiwa (24,20%) dengan persentase penduduk miskin di perkotaan sekitar 17,60% penduduk dan di perdesaan sekitar 31,90%. Persentase penduduk miskin tersebut mendekati persentase kemiskinan antara tahun 1981-1984. Perkembangan terakhir kondisi kemiskinan pada tahun 2005 adalah sebesar 35,10 juta jiwa (16,00%), dengan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,40% dan di perdesaan sebesar 19,50%. Sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Selain itu golongan lain yang rentan adalah pengangguran baik di kota maupun di desa yang perkembangannya akhir-akhir ini semakin meningkat, belum termasuk mereka yang telah di PHK.

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Menurut Winarno (2008:12) kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementerian/lembaga maupun tingkat masyarakat.

Salmirawati dalam Sari (2012:2) menyatakan, selama ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral,

regional, kelembagaan maupun kebijakan khusus. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain : Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada masa Orde Baru untuk membangun infrastruktur desa dan kegiatan ekonomi berbasis kelompok masyarakat, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Beras untuk masyarakat.

Pada tahun 2009, pemerintahan menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia di level 8%. Kenyataannya, sekitar 28,28 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan di bulan Maret tahun 2014, atau 11,25% dari total populasi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (<http://www.rappler.com/> Diakses, 18 Mei 2015).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2015).

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi penyumbang kemiskinan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Barat setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 354.738 jiwa. Penyebab kemiskinan di Sumatera Barat dipicu oleh terbatasnya akses masyarakat

terhadap layanan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin masih lemah. Selain itu, berbagai penyebab lain dari luar juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat seperti gejolak ekonomi yang diakibatkan inflasi, belum fokusnya program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mengintervensi RTS secara langsung.

Pada kenyataannya paradigma kemiskinan telah menghasilkan kondisi yang tidak seimbang antara kota dan desa, dimana kota menjadi pusat pertumbuhan, sedangkan desa hanya menjadi wilayah marginal dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah perkotaan. Dengan tidak berkembangnya wilayah perdesaan maka persoalan kemiskinan lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat secara persentase, jumlah penduduk miskin meningkat dari 8,0% menjadi 8,14%. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, atau mencapai 70,7% dari total penduduk miskin, sementara 29,3% penduduk miskin tinggal di perkotaan. Selain itu, tingkat pengangguran juga terus meningkat. Sepanjang 2012-2013 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar mengalami peningkatan dari 6,25% menjadi 6,33%. Sektor ekonomi formal, khususnya sektor industri, mengalami peningkatan penyerapan kerja dari semula 7,2% menjadi 8,1%.

Persentase penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2014 Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2013	2014
1	Kab. Kepulauan Mentawai	16,12	14,96
2	Kab. Pesisir Selatan	8,64	7,82
3	Kab. Solok	10,26	9,53
4	Kab. Sijunjung	8,53	7,74
5	Kab. Tanah Datar	5,77	5,29
6	Kab. Padang Pariaman	9,17	8,39
7	Kab. Agam	7,68	7,02
8	Kab. Lima Puluh Koto	8,26	7,48
9	Kab. Pasaman	8,37	7,6
10	Kab. Solok Selatan	8,12	7,33
11	Kab. Dharmasraya	7,74	6,97
12	Kab. Pasaman Barat	7,86	7,08
13	Kota Padang	5,02	4,56
14	Kota Solok	4,6	4,16
15	Kota Sawahlunto	2,28	2,25
16	Kota Padang Panjang	6,66	6,4
17	Kota Bukittinggi	5,36	4,96
18	Kota Payakumbuh	7,81	7,01
19	Kota Pariaman	5,35	5,12
Sumatera Barat		7,56	6,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2013-2014 di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin paling tinggi terdapat pada Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 16,12% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 14,96%. Persentase penduduk miskin paling rendah terdapat pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,28% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,25%.

Menurut Mok, dkk (2010) faktor-faktor penyebab kemiskinan yang *pertama* adalah demografi terdiri dari usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah tanggungan dalam rumah tangga, ras dan migrasi yang pernah dilakukan oleh keluarga tersebut. *Kedua* adalah status sosial dan ekonomi. Faktor penyebab kemiskinan rumah tangga secara status sosial dan ekonomi ini diindikasikan melalui jenis sektor pekerjaan yang dikerjakan oleh kepala rumah tangga. *Ketiga* yaitu pendidikan formal tertinggi yang telah dicapai oleh kepala keluarga. *Keempat* adalah region atau wilayah tempat tinggal.

Sumatera Barat mempunyai 19 daerah Tingkat II yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan luas wilayah 42.297 km². Dari luas tersebut 13,9% yang dapat diusahakan sebagai daerah pertanian. Penyebab lain kemiskinan di perdesaan di Sumatera Barat adalah status sosial ekonomi salah satunya yaitu struktur pekerjaan. Seperti diketahui bahwa masyarakat perdesaan sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 63.458 rumah tangga dari 707.698. Sektor pertanian bahkan menjadi satu-satunya mata pencaharian yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya ketika sektor pertanian terpuruk, maka kondisi petani juga ikut terpuruk. Selain itu banyaknya penduduk tua yang tinggal di desa

ini menjadikan perekonomian kurang berkembang dan kemiskinan lebih sulit untuk dihapuskan.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Sumatera Barat pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat
Tahun 2013-2014

KEGIATAN UTAMA	2013	2014
	(RIBUAN)	(RIBUAN)
PERTANIAN (ORANG)	817,9	818,7
	39,70%	37,60%
INDUSTRI (ORANG)	132,3	149,5
	6,40%	6,90%
PERDAGANGAN (ORANG)	472,8	487,1
	22,90%	22,30%
JASA KEMASYARAKATAN (ORANG)	354,4	419
	17,20%	19,20%
LAINNYA*)	283,7	306,1
	13,80%	14,00%
TOTAL	2.344,50	2.180,30
	100%	100%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

*) Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Keuangan, Pergudangan, Komunikasi, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Sumatera Barat pada tahun 2013-2014 lebih dominan pada lapangan pekerjaan pertanian yaitu sebesar 39,70% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 37,60%.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian tentang **“Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas,

1. Sejauhmana pengaruh variabel demografi (usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak berusia dibawah 15 tahun, jumlah anak laki-laki di rumah tangga, jumlah anak perempuan di rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga di atas 55 tahun, dan status perkawinan kepala rumah tangga) terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh variabel status sosial ekonomi (jenis pekerjaan dan status pekerjaan) terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh variabel demografi, status sosial ekonomi, dan pendidikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh variabel demografi (usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak berusia dibawah 15 tahun, jumlah anak laki-laki di rumah tangga, jumlah anak perempuan di rumah tangga,

jumlah anggota rumah tangga di atas 55 tahun, dan status perkawinan kepala rumah tangga) terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh variabel status sosial ekonomi (jenis pekerjaan dan status pekerjaan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh variabel demografi, status sosial ekonomi, dan *human capital* secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal membuat program dan kebijakan yang efektif terkait dengan pembangunan daerah terutama dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadi tambahan referensi bagi kegiatan akademis, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan serta mengetahui kondisi ketimpangan antar desa dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran, terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.
4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi sosial tenaga kerja dan transmigrasi.
5. Sebagai umpan balik dalam menyusun kebijakan baru bagi Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Trasmigrasi yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan.
6. Sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan moral. Lewis dalam Rajab (2004:20) mengemukakan kemiskinan adalah ketidak cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkat posisi sosial ekonominya. Tetapi masalahnya adalah sumber-sumber daya material yang dimiliki masyarakat miskin keadaannya sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk memepertahankan kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Muhamad (2004:2) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan maupun non pangan, khususnya pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan kebutuhan transportasi.

Konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh Muhamad ini menggambarkan ketidakmampuan orang miskin atau suatu kelompok masyarakat miskin pada kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam konsep tersebut tentunya kita bisa menarik suatu kesimpulan bagaimana masyarakat miskin berupaya meningkatkan perekonomiannya jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan untuk meningkatkan tingkat perekonomian mereka harus mendapat bantuan dan bantuan itu bukan sekedar bantuan yang berupa materi tetapi berikut kesempatan-kesempatan dalam memanfaatkan sumber-sumber capital

Departemen sosial dan Badan Pusat Statistik (2002:4) sebagai suatu badan yang berkepentingan langsung dengan masalah kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Badan Pusat Statistik dan Departement Sosial menentukan garis kemiskinan dengan penilaian jumlah rupiah yang didapatkan seseorang untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari.

Sedangkan menurut Sadewo (2007:21) kemiskinan adalah suatu proses dan dipihak lain, kemiskinan merupakan suatu akibat atau fenomena dalam suatu masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat, sehingga terjadilah suatu ketimpangan sosial yang sangat menonjol. Dengan demikian, kemiskinan dapat pula dipandang sebagai salah satu akibat dari kegagalan dari kelembagaan pasar bebas dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada anggota masyarakat.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:181)kemiskinan sebenarnya tidak hanya diamati, namun juga harus dirasakan. Membangun empati bersama dengan orang miskin mungkin lebih dari cukup, terutama bagi yang mau mengambil keputusan public.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kuncoro (2003:123), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi.

Todaro (2006: 203) menyatakan kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Rajab (2004:20) berbagai pemerintah yang diajukan guna manggulangi kemiskinan selalu tersendat dan tidak efektif dikarenakan akses dan kontrol warga masyarakat miskin pada berbagai sumber kapital masih terbatas, sektor politik memang mengalami perubahan tetapi perubahan politik tersebut telah memunculkan berbagai konflik kepentingan dikalangan elit daerah dan pusat yang berusaha mempertahankan kontrol mereka pada sumber-

sumber kapital dan enggan untuk membuka secara langsung sumber-sumber kapital itu untuk masyarakat miskin.

Pendapat ini mengemukakan bahwa konflik elite politik antara pusat dan daerah untuk mempertahankan sumber-sumber kapital telah menjauhkan mereka pada perhatian atas orang-orang miskin, sumber kapital yang dimaksud adalah pendapatn-pendapat dari sumber daya alam yang terkandung diadaerah yang klaim oleh pusat maupun daerah dan menjadi konflik. Sebenarnya kontrol atas sumber-sumber kapital tidak masalah di pegang oleh siapapun asalkan akses atau peruntukan harus sangat terbuka bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum.

b. Dimensi Kemiskinan

Menurut Widodo (2006:296) kemiskinan memiliki tiga dimensi, yaitu :

1) Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

2) Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

3) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran

kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan *absolute* dan kemiskinan relative (Arsyad dalam Widodo, 2006: 298):

1) Kemiskinan Absolut

Dalam konsep ini kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Apabila pendapatan tersebut tidak mencapai kebutuhan minimum, maka dapat dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan Pendapatan Tabungan Rendah Investasi Rendah minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada garis kemiskinan yang berlaku

pasti dan umum, hal itu dikarenakan garis kemiskinan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan.

Menurut Suryawati (2005:122) kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

- 3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

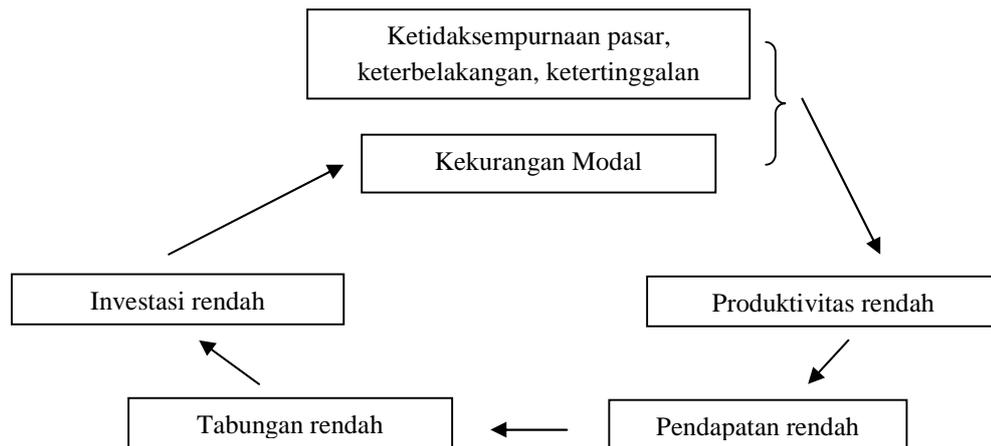
2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang digambarkan pada Gambar 1. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.

Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



Gambar 1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) oleh Nurkse

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin”(A country is poor because it is poor). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua

faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

Ritonga (2004:2) juga mengemukakan pendapatnya tentang kegagalan-kegagalan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia menurutnya ada dua faktor program penanggulangan kemiskinan di Indonesia:

- 1) Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan untuk orang miskin, upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan.
- 2) Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Ritonga beranggapan seperti ini karena program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah selama ini dianggap hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat miskin untuk selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah bukannya memberdayakan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, juga karena pemahaman yang minim tentang berbagai penyebab kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia memang bukan suatu hal yang baru tetapi kemiskinan juga bukan suatu masalah yang tanpa sebab yang hadir ketengah-tengah masyarakat kita sitidaknya ada penyebab dari adanya masalah kemiskinan tersebut David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi: yang *pertama* adalah kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, Globalisasi menghasilkan pemenang dan

pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

Kedua adalah kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). Yang *ketiga* adalah kemiskinan sosial, Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. *Kemiskinan konsekuensi*, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut Mok, dkk (2010) faktor-faktor penyebab kemiskinan yang *pertama* adalah demografi terdiri dari usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah tanggungan dalam rumah tangga, ras dan migrasi yang pernah dilakukan oleh keluarga tersebut. *Kedua* adalah status sosial dan ekonomi. Faktor penyebab kemiskinan rumah tangga secara status sosial dan ekonomi ini diindikasikan melalui jenis sektor pekerjaan yang dikerjakan oleh kepala rumah tangga. *Ketiga* yaitu pendidikan formal tertinggi yang telah dicapai oleh kepala keluarga. *Keempat* adalah region atau wilayah tempat tinggal.

Sharp, *et, al* (2000:173-191) mengidentifikasi penyebab dari sisi ekonomi.

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
- 3) Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Menurut BPS (2008), faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu kepemilikan aset tempat tinggal yang menjadi luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, frekuensi makan sehari, sejumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke

puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab (Widodo, 2006:297), yaitu :

- 1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
- 2) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- 3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut.
- 4) Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Natsir, dkk (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga. Analisis yang dilakukan yaitu analisis regresi logistic. Hasil penelitian faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Purworejo dengan pengaruh yang berturut-turut dari yang paling besar adalah jumlah anggota rumah tangga, konsumsi air bersih, angka ketergantungan, umur, pendidikan, sector pekerjaan, keluhan kesehatan, dan daerah tempat tinggal.
2. Penelitian yang dilakukan M. Thamrin Noor (2005). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian modal, curahan jam kerja, dan budaya berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan; penyakit yang diderita seluruh keluarga dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan; dan pendidikan dan fasilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di kota; di kota faktor pendidikan, budaya, dan fasilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan di desa faktor pendidikan, penyakit, dan fasilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Penelitian yang dilakukan Mok, dkk (2010). Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kemiskinan perkotaan di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan menggunakan data Household Expenditure Survey (HES). Analisis yang digunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan variabel usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, banyaknya anak usia di bawah 15 tahun, banyaknya wanita dewasa dalam rumah tangga, banyaknya laki-laki dewasa dalam rumah tangga, banyaknya anggota keluarga yang berusia 55 tahun, status pernikahan, migran, ras, sektor pekerjaan, pendidikan tertinggi, region tempat tinggal secara bersama-sama signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel terikat kemiskinan rumah tangga, sedangkan variabel bebasnya yaitu: demografi, status sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah topik penelitian yang peneliti teliti yaitu mengenai Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, hal ini juga dapat dilihat dari waktu penelitian yang berbeda, tempat penelitian, lama penelitian dan jumlah variabel penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah.

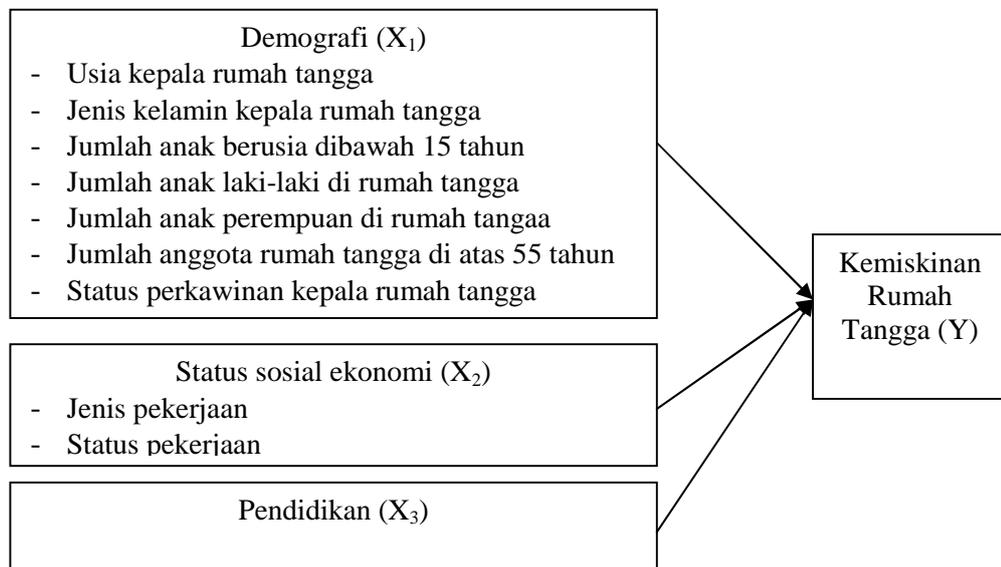
Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar minimumnya baik untuk sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan minimum lainnya. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan. Pada penelitian ini mencoba untuk mengetahui Determinan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah demografi (X1), status sosial ekonomi (X2), dan tingkat pendidikan (X3), sebagai variabel bebas dan kemiskinan rumah tangga sebagai variabel terikat (Y).

Variabel Demografi (X1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan rumah tangga (Y). Terdapat pengaruh erat antara demografi dengan kemiskinan rumah tangga, semakin tinggi usia kepala rumah tangga yang termasuk indikator dari demografi, Artinya semakin tua seseorang maka semakin tidak produktif dalam bekerja dan dapat menjadi penyebab kemiskinan dalam rumah tangga.

Variabel status sosial ekonomi (X2) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan rumah tangga (Y). Terdapat pengaruh erat antara status sosial ekonomi dengan kemiskinan rumah tangga, artinya adanya pekerjaan dan status pekerjaan yang baik akan menurunkan kemiskinan rumah tangga.

Variabel Pendidikan (X_3) berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga (Y). Terdapat pengaruh erat antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan rumah tangga, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah kemiskinan rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya, sebagai pedoman acuan berfikir penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan membuat bagan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006), hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenarannya melalui data terkumpul. Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi secara parsial terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel status sosial dan ekonomi secara parsial terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$H_a: \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi, status sosial ekonomi, dan pendidikan secara simultan terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_3 = 0$$

$$H_a: \text{salah satu } \beta_i \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh vektor demografi terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Usia kepala rumah tangga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan
 - b. Jenis kelamin kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - c. Jumlah anak berusia dibawah 15 tahun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - d. Jumlah anak laki-laki di rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - e. Jumlah anak perempuan di rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - f. Jumlah anggota rumah tangga di Atas 55 Tahun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - g. Status perkawinan kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap

- h. tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
2. Pengaruh vektor status sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga perdesaan di Provinsi Sumatera Barat
 - a. Jenis lapangan pekerjaan kepala rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 - b. Status pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 3. Vektor pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga Perdesaan.
 4. Secara bersama-sama vektor demografi yang terdiri dari usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak berusia dibawah 15 tahun, jumlah anak laki-laki di rumah tangga, jumlah anak perempuan di rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga di atas 55 tahun, status per kepala rumah tangga, dan vektor status sosial ekonomi yang terdiri dari jenis lapangan pekerjaan kepala rumah tangga dan status pekerjaan, serta vektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga pada taraf signifikansi 10 %.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Arah dan Strategi khusus oleh pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan perekonomian khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan program keluarga berencana agar jumlah anggota keluarga dapat terkontrol dan berdampak terhadap penanganan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Perlu adanya pemerataan pembangunan guna mengentas kemiskinan, dikarenakan jika terpusat maka masyarakat akan memilih lokasi tersebut untuk mengadu nasib demi meningkatkan perekonomian mereka.
4. Perlu adanya pembangunan sarana pendidikan demi perbaikan SDM di Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan pendidikan dasar terutama bagi masyarakat miskin.
5. Perlunya peran pemerintah dalam merangkul perusahaan-perusahaan swasta untuk menciptakan peluang kerja dan memberikan modal dalam pengentasan kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Weri, N. 2010. *Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Nagari Malai V Suku)*. Jurnal. Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Perhitungan Angka Kemiskinan BPS VS World Bank*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*. BPS: Jakarta.
- Cahyat, A, Gooner, C, dan Haug, M. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh Dari Kutai Barat*. CIFOR: Bogor.
- Gounder, Neelesh. 2005. *The Determinants of Household Poverty in Fiji. Australia*. Griffith University.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Larasaty, Ni Made Umi, 2003, *Analisis Alokasi Waktu Bekerja Wanita Studi Kasus Dua Desa di Kabupaten Badung*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Mok, T.Y.1, C. Gan1 and A. Sanyal. 2010. *The Determinants of Urban Household Poverty in Malaysia*. Lincoln University, Canterbury: New Zealand.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Usman, Hardius. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nopriansyah, Junaidi, Etik Umiyati. 2015. *Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 3.
- Rajab, Budi. 2004. *Akar Kemiskinan dan Penanggulangannya*. *Harian Pikiran Rakyat*, edisi Sabtu 30 Oktober 2004. Bandung.